

# BREAK THE BIAS

Maret 2022





Seluruh teks © 2022 **BREAK THE BIAS** berlisensi di bawah Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

**Penulis**

Coory Yohana, Nurry Aidawardhani, Rebecca Liony, Nurul Azizah, Iman Amirullah, Agela Ranitta Kusumadewi, RC. Nurul A'la, annisa Inayah

**Penyunting**

Nabila Auliani Ruray, Erlangga Saputra

**Tata Letak Isi**

Julian Louis Sugiharto

**Perancang Ilustrasi**

Indriani Widiastuti

**Penyumbang Ilustrasi**

Nurri Aidawardhani

**Perancang Sampul**

Indriani Widiastuti

Ditulis dan diterbitkan oleh:

**Perkumpulan Pamflet Generasi**

Komplek Buncit Indah

Jalan Mimosa IV Blok E No 17, Pejaten Barat

Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510, Indonesia

[www.pamflet.or.id](http://www.pamflet.or.id)

E-mail: [pamfletindonesia@gmail.com](mailto:pamfletindonesia@gmail.com)



## DAFTAR ISI

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar                                                              | iv |
| Perjuangan Perempuan Belum<br>Lengkap Tanpa Interseksionalitas              | 1  |
| Refleksi Sebuah Sinema, Ruang<br>Bagi Perempuan <i>Queer</i>                | 6  |
| Perempuan dan Seni Peran                                                    | 15 |
| Jurnalis Menulis Isu Kekerasan<br>Seksual: Memang Tak Mudah<br>Ferguso!     | 21 |
| Gerakan Perempuan,<br>Solidaritas, dan Reformasi<br>Politik Indonesia       | 28 |
| Ketika Status Perkawinan<br>Perempuan Jadi Masalah:<br>Refleksi Film "YUNI" | 33 |
| Pendekar Berbalut Batik<br>Kebaya                                           | 37 |
| TERAS (Tebak Waras)                                                         | 39 |
| Mengenal Koalisi Inklusif<br>Right Here Right Now (RHRN)                    | 42 |
| Tentang Kami                                                                | 48 |





## Kata Pengantar

**N**ewsletter kali ini bukanlah newsletter kali pertama Pamflet membahas secara khusus perjuangan perempuan. Sebelumnya pada November 2021, kita juga membahas secara spesifik peringatan 16 Hari Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang di dalam edisinya berisikan nafas-nafas perjuangan perebutan posisi setara perempuan. Newsletter kali ini juga bukan produk pertama yang dikeluarkan Pamflet untuk menggemakan nafas-nafas perjuangan perempuan. Sudah banyak produk komunikasi yang kami susun dan rilis di sosial media Pamflet. Namun, yang berbeda dari newsletter ini adalah Ia secara spesifik banyak membahas bagaimana seni dapat menjadi medium yang fundamental dalam perjuangan-perjuangan perempuan merebut kesetaraan dan keadilan. Tulisan Rebecca Liony dan Nurry dengan jelas mengilustrasikan hal itu.

Kedua, hal lain yang juga khas dari edisi ini, dan selalu kami jaga pendekatannya, ialah proses Pamflet dalam mengkurasi nawalaini. Ia dibuat dari kumpulan buah pikir, tidak hanya di internal Pamflet, tetapi juga orang muda di luar Pamflet yang ingin ikut mengamplifikasi perjuangan



dan suara-suara perempuan. Oleh karenanya, nawala ini bersifat kolektif dan penyusunannya sangat demokratis—sebuah semangat yang penting dalam setiap perjuangan perebutan kesetaraan.

Ketiga dan tidak kalah penting, nawala ini juga melibatkan sekutu perempuan, utamanya laki-laki, yang menurut hemat kami memiliki peran dalam membantu narasi-narasi seputar kesetaraan gender semakin masuk akal. Suaranya penting untuk didengar juga sebagai korban dari berkuasanya maskulinitas dan heteronormativitas yang justru acapkali juga merugikan laki-laki itu sendiri.

Di hari Perempuan Internasional Sedunia, kami sangat berharap semangat-semangat para puan dan sekutu puan bisa saling bersinergi dan terkoneksi. Kami juga berharap narasi di nawala yang mencoba menggali medium seni mampu menginspirasi banyak pembaca.

Terima kasih saya ucapkan kepada orang muda yang telah mengirimkan karyanya untuk masuk ke dalam nawala ini, internal Pamflet, Rutgers Indonesia, Koalisi INKLUSIF, dan Kementerian Luar Negeri Belanda karena atas dukungannya newsletter ini bisa terbit. Terima kasih atas kerja keras dan kerjasama semua pihak sehingga narasi di newsletter ini dapat dinikmati dengan baik oleh pembaca.

Salam hangat,

Astried Permata  
Koordinator Umum Pamflet

# PERJUANGAN PEREMPUAN BELUM LENGKAP TANPA INTERSEKSIONALITAS

Oleh : Coory Yohana

Sebagai hari penting yang berasal dari gerakan buruh, Hari Perempuan Internasional (IWD) turut diperingati di Indonesia. Setidaknya sejak 2016, setiap tanggal 8 Maret dipenuhi dengan aksi-aksi seperti longmars di beberapa kota di Indonesia.<sup>1</sup>

Ada banyak tuntutan dan isu yang sering diangkat dalam momentum ini. Masalah pengesahan peraturan berkaitan dengan kekerasan seksual lewat RUU PKS (kini TPKS),<sup>2</sup> pemberian perlindungan yang jelas terhadap pekerja rumah tangga (PRT) dengan RUU Perlindungan PRT, penjaminan pemenuhan hak-hak buruh, dan penghentian kekerasan yang sedang terjadi di Papua adalah beberapa di antaranya.

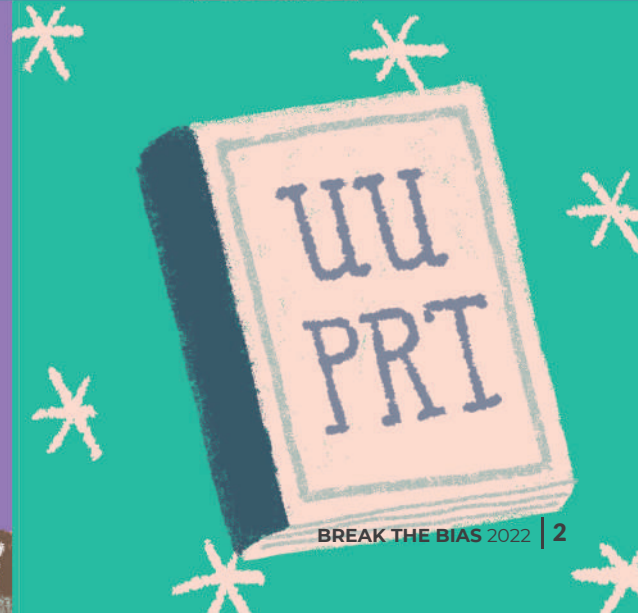
Untuk bisa melihat banyak isu yang terangkat dalam Hari Perempuan Internasional ini, ada satu konsep yang perlu menjadi panduan kita bersama: Interseksionalitas.

Dikenalkan oleh Kimberlé Crenshaw (1989), konsep ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap gerakan anti-rasisme dan gerakan feminisme yang tidak berhasil mengakomodasi pengalaman perempuan kulit hitam. Pada saat itu, Crenshaw mengkritik gerakan anti-rasisme yang

---

<sup>1</sup> Indra, Putu. *Tirto.id*. Berbagai aksi warnai peringatan hari perempuan internasional. 8 Maret 2016. Diakses dari: <https://tirto.id/berbagai-aksi-warnai-peringatan-hari-perempuan-internasional-fJv>

<sup>2</sup> RUU PKS: Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual; TPKS: Tindak Pidana Kekerasan Seksual







didominasi oleh laki-laki kulit hitam dan juga gerakan feminisme yang didominasi oleh perempuan kulit putih. Dalam kritiknya itu, Crenshaw mengenalkan konsep interseksionalitas yang berupaya menjelaskan bagaimana pertemuan identitas ras dan gender membentuk pengalaman perempuan kulit hitam.<sup>3</sup>

Konsep ini kemudian terus berkembang, melampaui kategori ras dan gender. Saat ini, interseksionalitas didefinisikan sebagai hubungan tumpang tindih antara identitas sosial seperti gender, kelas, ras, suku, seksualitas, keyakinan, abilitas dan sebagainya. Menurut konsep ini, tumpang tindih identitas ini dapat menghasilkan diskriminasi maupun sebaliknya, hak istimewa (privilege) berlapis.<sup>4</sup>

Misalnya, buruh perempuan muda asal Sumatera dan bekerja di Jakarta memiliki pengalaman hidup spesifik, yang dihasilkan

dari kelas, usia, dan asal wilayahnya. Sementara itu, laki-laki Muslim, asal Jawa dan berpendidikan formal memiliki hak istimewa yang berasal dari keuntungan-keuntungan identitas sosialnya yang cenderung dominan di masyarakat kita.

Pemahaman mengenai konsep interseksionalitas ini dapat membantu kita untuk melihat momentum Hari Perempuan Internasional secara lebih kritis. Bagaimana kita mengartikan pengalaman perempuan, akan dipengaruhi oleh banyak persimpangan identitas lain. Dengan begitu, pembahasan isu di Hari Perempuan tidak menjadi diskusi yang tunggal dalam satu definisi perempuan saja. Di Indonesia, tuntutan pengesahan RUU PPRT menjadi salah satu hal yang kita bisa telaah menggunakan konsep ini. RUU PPRT diinisiasi untuk menjadi landasan hukum yang dapat memberikan perlindungan secara formal bagi PRT.

---

<sup>3</sup> Crenshaw, Kimberlé, *Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color*. Stanford Law Review.1991

<sup>4</sup> Gopaldas, Ahir. *Intersectionality 101*. *Journal of Public Policy and Marketing*. 2013



PRT adalah sebuah pekerjaan yang sangat banyak dilakukan terutama di Indonesia, namun belum diakui sebagai profesi yang harus diatur secara formal seperti profesi lainnya karena ranah pekerjaan yang dianggap termasuk dalam ranah domestik. Hingga tahun 2015, Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat jumlah PRT di Indonesia mencapai 52,6 juta jiwa dan 67,1 persen adalah perempuan.<sup>5</sup>

Perempuan PRT mengalami kerentanan akibat kondisi pekerjaan yang belum terjamin perlindungannya ini. Ditambah lagi, 30 persen dari PRT perempuan dikategorikan dalam usia anak (di bawah 18 tahun).<sup>6</sup> Kondisi ini membuat anak perempuan PRT menghadapi kerentanan dari pengguna jasa (sering disebut majikan), dari kelas sosial dan ekonomi yang cenderung rendah, dan dari ketiadaan perlindungan hukum apabila terjadi tindak kekerasan.

Selain isu PRT, interseksionalitas mampu menjadi pisau analisis yang bisa menelaah berbagai konteks kerentanan berlapis perempuan lainnya di Indonesia. Ia bisa kita pakai dalam melihat pengalaman perempuan nelayan di wilayah pesisir, perempuan buruh garmen yang menghadapi kondisi kerja tidak layak dan beban kerja ganda, akses pendidikan untuk anak perempuan dengan disabilitas, kondisi pelayanan kesehatan bagi transpuan lansia, hingga perampasan lingkungan hidup perempuan adat.

Pada momentum IWD ini, melihat kembali isu perempuan Indonesia dalam berbagai ranah menjadi sesuatu yang wajib kita dorong bersama. Mari tidak berhenti pada 'perempuan' saja; namun juga pada suku, seksualitas, abilitas, kelas, dan segala yang bertumpang tindih dan semakin menempatkan perempuan di kondisi yang rentan.



<sup>5</sup> JalaStoria.id. Perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. 8 Oktober 2021. Diakses dari: <https://www.jalastoria.id/perlindungan-terhadap-pekerja-rumah-tangga/>

<sup>6</sup> Kapal Perempuan. Hari pekerja rumah tangga (PRT) internasional. 16 Juni 2020. Diakses dari: <https://kapalperempuan.org/hari-pekerja-rumah-tangga-prt-internasional/>

## Referensi

Crenshaw, Kimberlé, Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*. 1991

Gopaldas, Ahir. Intersectionality 101. *Journal of Public Policy and Marketing*. 2013

Indra, Putu. *Tirto.id*. Berbagai aksi warnai peringatan hari perempuan internasional. 8 Maret 2016. Diakses dari: <https://tirto.id/berbagai-aksi-warnai-peringatan-hari-perempuan-internasional-fJv> Storia.id. Perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. 8 Oktober 2021. Diakses dari: <https://www.jalastoria.id/perlindungan-terhadap-pekerja-rumah-tangga/>

Kapal Perempuan. Hari pekerja rumah tangga (PRT) internasional. 16 Juni 2020. Diakses dari: <https://kapalperempuan.org/hari-pekerja-rumah-tangga-prt-internasional/>

RUU PKS: Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual; TPKS: Tindak Pidana Kekerasan Seksual



# REFLEKSI SEBUAH SINEMA, RUANG BAGI PEREMPUAN *QUEER*

Oleh : Nurry Aidawardhani



**A**gaknysa saya perlu mengantarkan kawan-kawan dengan sebuah konteks sebelum kemudian berjumpa dengan refleksi personal saya tentang sinema dan perempuan *queer*.

Gerakan perempuan hari ini mulai menunjukkan posisi interseksional dan inklusifnya terhadap lapis-lapis identitas lain yang dimiliki oleh perempuan. Lapis identitas seperti perbedaan kelas, ras, hingga ragam gender dan seksualitas tidak luput menjadi wacana yang diangkat dalam gerakan perempuan. Termasuk pelibatan perempuan beridentitas *queer* yang sejak akhir gelombang kedua feminisme tahun

1970-an sudah mulai menggaungkan suaranya lewat gerakan transgender perempuan dan gerakan perempuan lesbian.

*Queer* dalam tulisan ini diartikan sebagai identitas di luar heteronormatif atau dapat juga diartikan sebuah istilah payung untuk orang-orang yang merupakan bagian dari kelompok LGBT+ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan lainnya).

Jika dalam sejarah awal sinema film digunakan sebagai salah satu medium berkarya seni, sekarang film juga bertransisi menjadi ruang strategis untuk aktivisme. Seperti yang diungkapkan









Turner<sup>1</sup>, film adalah pembentuk budaya dan bukan hanya bertarget akhir sebagai pengembangan seni; tetapi bagian dari argumen yang lebih luas tentang representasi, proses sosial pembuatan gambar, suara, serta tanda/symbol yang memiliki arti tersendiri.

Sebelum menggali tentang perempuan beridentitas *queer* dalam sinema, mari kita tinjau terlebih dahulu realita perempuan dalam sinema. Keterlibatan perempuan dalam sinema memiliki sebuah daya tawar tersendiri dalam gerakan perempuan hari ini. Paparan yang bisa dijangkau sebuah film dalam membungkus suatu ‘permasalahan’ menjadi pertimbangan masuknya gerakan perempuan ke dalam sinema. Misalnya, bagaimana film *Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI* (1984) karya Arifin C. Noer menghantui masyarakat Indonesia dengan bayangan kejam Gerakan Wanita Indonesia/Gerwani sebagai ‘perempuan penggoda dan pengebiri jenderal’. Film ini digunakan sebagai alat propaganda penguasa untuk menciptakan iklim paranoia dan kemarahan pada Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk Gerwani, gerakan perempuan Indonesia yang tercatat progresif pada masanya. Jika film Arifin C. Noer adalah kemunduran bagi narasi perempuan yang melawan penguasa, maka narasi tandingan yang bisa disuarakan adalah film menjadi media pemberdayaan bagi gerakan perempuan. Lewat beragam media representasi, termasuk film, wacana dapat dibuat, dimunculkan, dan diorganisasi menjadi sebuah kekuatan (*power*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Turner, G., & Duckham, M. F. (2006). *Film as social practice*. Routledge.

<sup>2</sup> Irawanto, B. (2008). *Film Propaganda: Ikonografi Kekuasaan dalam Putra, I Gusti Ngurah* (2008). Media, Komunikasi, dan Politik Sebuah Kajian Kritis. Yogyakarta: Penerbit FISIPOL UGM.

Representasi perempuan dalam film masih terpusat pada penggambaran perempuan yang terkonstruksi secara visual dan naratif.<sup>3</sup> Representasi perempuan kemudian menjadi fokus yang terbatas pada seberapa banyak dan berpengaruhnya penceritaan dan pemeran perempuan dalam suatu film. Sedangkan, film tidak hanya berarti hasil audiovisual di depan layar saja, melainkan juga ada proses produksi dan proses di belakang layar. Film memiliki kekuatan untuk menanamkan nilai-nilai dan ideologi kepada penontonnya. Kekuatan itu bisa dimiliki oleh para perempuan yang memiliki kesempatan dan berani terlibat dalam proses produksi, seperti menjadi sutradara, pemeran utama, sinematografer, produser, penyunting, bahkan kritikus film.

Berangkatnya gerakan perempuan masuk di dunia sinema juga dikarenakan dominasi *male gaze* (tatapan laki-laki), sebuah cara pandang maskulin yang menempatkan perempuan dalam posisi yang “dilihat” secara pasif. *Male gaze* dalam sinema dikonstruksi oleh cara kamera atau sutradara mengambil gambar karakter perempuan dan cara karakter laki-laki memperlakukan karakter perempuan, yang berdampak pada cara penonton menatap dan memaknai karakter perempuan.<sup>4</sup>

*Male gaze* memang menyumbang representasi perempuan dalam film. Namun, representasi perempuan tersebut merupakan perempuan yang diobjektifikasi, pasif, serta ditampilkan secara seksual. Sebagai contoh, di media iklan komersial dot bayi pada tahun 2013, bukannya mengiklankan fungsi dot untuk bayi, iklan tersebut justru menampilkan adegan perempuan yang tengah senam dan laki-laki yang memperhatikan payudara perempuan tersebut.<sup>5</sup> Ada pula adegan saat bayi di kereta dorong akan dipeluk oleh seorang perempuan, kamera mengambil sudut pandang ke arah payudara seolah bayi tersebut hanya berfokus pada payudara perempuan tersebut. Cara pandang mengobjektifikasi dan menseksualisasi perempuan ini menjadi seolah wajar karena kamera dan pengambilan gambar dikontrol oleh orang-orang di bagian produksi belakang layar yang didominasi maskulinitas.

Jika menggunakan logika *male gaze*, berarti dalam sebuah produk visual seperti film wajib ada setidaknya satu karakter laki-laki dan karakter perempuan yang keduanya adalah heteroseksual, sehingga ada tatapan laki-laki di sana. Sayangnya, logika yang sudah cacat dari awalnya ini juga mempengaruhi penceritaan perempuan yang bukan heteroseksual, seperti

---

<sup>3</sup> Cowie, E. (1997). *Representing the Woman: Cinema and Psychoanalysis*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

<sup>4</sup> Mulvey, L. (2009). *Visual Pleasure and Narrative Cinema*, in *Visual and Other Pleasures*, 2nd edition . Basingstoke: Palgrave Macmillan

<sup>5</sup> Maharani, F., & PB, S. A. (2020). Representasi *Male Gaze* terhadap Perempuan dalam Iklan Dot Dodo. *Jurnal Audiens*, 1(2), 199-205.

biseksual dan lesbian atau selanjutnya kita sebut perempuan *queer*. Walaupun tidak ada karakter laki-laki karena film mengisahkan romansa perempuan dengan perempuan, pada praktiknya, banyak film perempuan *queer* justru semakin memperkuat dominasi *male gaze*.

Film dengan karakter perempuan *queer* sekalipun tidak lepas dari objektifikasi secara seksual dan diekspektasikan untuk penonton yang justru adalah laki-laki heteroseksual. Alih-alih memberikan representasi perempuan *queer*, film *queer* dengan logika *male gaze* hanya menjadikan perempuan *queer* sebagai objek seksual. Ia tidak memiliki unsur memberdayakan sama sekali dan justru semakin memperkuat stigma buruk. Terlalu banyak contoh film dengan cerita perempuan *queer* yang sudah diproduksi di luar sana—sama banyaknya dengan para laki-laki heteroseksual yang menjadi sutradara, sinematografer, atau produser di balik layar kisah perempuan *queer*. Salah satu film perempuan *queer* yang bernuansa *male gaze* adalah film lesbian fenomenal dari Prancis, *Blue is the Warmest Colour* (2013). Film tersebut dikritik oleh Manohla Dargis dalam artikelnya di New York Times<sup>6</sup> karena pengambilan gambar dari sudut pandang maskulin oleh sutradara laki-laki heteroseksual, Abdellatif Kechiche yang

terlalu menseksualisasi (*oversexualizing*) adegan seks kedua karakter perempuan, Adèle dan Emma, sehingga menghilangkan inti penceritaan relasi *queer* dan condong menjadi tontonan pornografi.

Mengingat bahwa pengalaman perjuangan perempuan adalah hal yang sangat personal bagi perempuan, terlebih dalam konteks perempuan *queer*, hal ini begitu menggajal. Rasa menggajal ini kemudian mendorong refleksi saya lebih jauh sebagai seorang penonton film *queer*. Jika suatu hari perempuan *queer* mendapatkan ruang untuk mengekspresikan identitasnya melalui media film, akan seperti apa jadinya film itu?

Pandemi COVID-19 secara signifikan mempengaruhi konsumsi saya terhadap media-media audiovisual seperti film dan serial. Tiga hari setelah pengumuman pandemi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Indonesia pada pertengahan Maret 2020, saya berjumpa dengan film produksi tahun 2019 yang berlatar tahun 1770 di Prancis, *Portrait of A Lady on Fire*.<sup>7</sup> Penyakit saya ketika menonton film adalah hadirnya “ekspektasi”. Seringkali dalam pengalaman menonton, saya sudah kadung berekspektasi berdasarkan pengalaman menonton sebelumnya. Sebagai film yang berada dalam genre romansa sesama

---

<sup>6</sup> Dargis, M. (2013, 25 Oktober). *Seeing You Seeing Me*. The New York Times. Diakses dari: <https://www.nytimes.com/2013/10/27/movies/the-trouble-with-blue-is-the-warmest-color.html>

<sup>7</sup> Memiliki judul Bahasa Prancis, *Portrait de la jeune fille en feu*, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi Potret Seorang Perempuan yang Terbakar



perempuan, saya sudah membayangkan film *Portrait of A Lady on Fire* akan menjadi film *period*<sup>8</sup> plot lambat dengan glorifikasi eksotisme ala abad pencerahan Eropa.

Ternyata, film ini justru mendobrak ekspektasi tersebut dengan sebuah pengalaman kebaruan dalam menonton film. Ya, film ini adalah film pertama yang membuat saya merasa melihat dan dilihat sebagai seorang perempuan *queer*.



Tulisan ini tidak akan mengulas apa isi film *Portrait of A Lady on Fire*, melainkan temuan menarik pasca menonton, yaitu sang sutradara dan penulis naskah

Céline Sciamma. Film tersebut menjadi film panjang keempat Sciamma. Sebagai sutradara di negara kelahiran film, Prancis, kiprahnya selama satu dekade

---

<sup>8</sup> Film *period* adalah istilah untuk film sejarah dan adaptasi klasik yang mengambil latar di masa lalu. Film ini bisa memiliki genre yang beragam seperti petualangan, *thriller*, romansa, komedi dan sebagainya. Disadur dari Vidal, B. (2012). Introduction: *Period Film and the Mannerist Moment*. In *Figuring the Past: Period Film and the Mannerist Aesthetic* (hlm. 9–26). Amsterdam University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt46mt18.4>

menghasilkan empat film panjang adalah bilangan yang sedikit. Ketika saya mengetik namanya di mesin pencarian, sorotan film *Portrait of A Lady on Fire* menjadi temuan paling atas. Artikel, ulasan, dan kritik yang bernuansa pujian ditujukan kepada Sciamma. Sebuah artikel wawancara media Vox dengan Céline Sciamma<sup>9</sup> menjawab rasa kebaruan yang saya rasakan setelah menonton film tersebut.

“Ini menjadi masuk akal”, batin saya saat setelah membaca jawaban-jawaban Sciamma dalam wawancara tersebut.

Bagi Sciamma, kisah perempuan *queer* (lesbian) sering digambarkan seperti tragedi (misalnya mendapat penolakan dalam masyarakat). Padahal, di luar sana ada perempuan *queer* yang berdaya, merupakan aktivis, bisa memilih untuk hidup dengan kebebasan, hingga memilih tidak menikah atau tidak memiliki anak. Gambaran perempuan yang memiliki kesempatan memilih, ditampilkan Sciamma melalui karakter Marianne, seorang pelukis perempuan yang pada latar waktu tersebut tidak mendapat kesempatan setara sebagaimana pelukis laki-laki di dunia seni Prancis. Namun, Marianne dapat memilih profesi yang dia inginkan, preferensi bentuk hubungan, pilihan tidak harus menikah, bahkan memiliki otoritas penuh atas hak kesehatan seksual dan reproduksinya. Sedangkan gambaran kisah perempuan *queer* yang seakan tragedi diantar Sciamma melalui

karakter Héloïse, perempuan aristokrat, menghabiskan separuh hidupnya di biara, dan dipaksa untuk menikah dengan laki-laki heteroseksual. Walaupun seiring terbangunnya karakter Héloïse, ia ditampilkan secara egaliter bersama Marianne.

Menggabungkan dua karakter perempuan dengan pengalaman eksplorasi yang berbeda disatukan dalam relasi *queer*, tentu seperti eksperimen Sciamma di perhelatan sinema dunia. Walaupun ada perbedaan pengalaman perempuan di sana, Sciamma bisa menghadirkan bentuk visualisasi kesetaraan yang mungkin terjadi di antara perempuan. Cerita fiksi karya Sciamma dalam *Portrait of A Lady on Fire* adalah cerita yang berbahaya. “*These stories are really dangerous for patriarchy*”<sup>10</sup>, ucap Sciamma. Membaca jawaban demi jawaban wawancara Sciamma dalam artikel tersebut tidak berhenti membuat saya tersenyum. Sciamma memperkenalkan saya kepada cara menatap yang baru dalam sinema, yaitu tatapan perempuan, *female gaze*, kritik kultural untuk merebut kembali cerita-cerita mengenai pengalaman perempuan dari sudut pandang perempuan.

“*It’s (Portrait of A Lady on Fire) to represents us, so a lot of people feel seen*”.<sup>11</sup> Dari kalimat tersebut saya meyakini Sciamma adalah perempuan *queer*, sebelum akhirnya menemukan artikel-artikel lain tentang aktivismenya di sinema dan gerakan perempuan Prancis. Sebagaimana *male gaze*

---

<sup>9</sup> Emily VanDerWerff (2020, 19 Februari). *Portrait of a Lady on Fire* director Céline Sciamma on her ravishing romantic masterpiece. Vox. Diakses dari <https://www.vox.com/>

<sup>10</sup> Terjemahan: “Ini adalah cerita-cerita yang membahayakan untuk patriarki”

<sup>11</sup> Terjemahan: “Film (*Portrait of A Lady on Fire*) bertujuan untuk menjadi representasi kita, sehingga semua orang merasa dilihat”

pun membuat Sciamma, seorang sutradara perempuan *queer* muak dengan narasi dominan soal perempuan *queer* yang obsesi dibuat oleh laki-laki heteroseksual. Tentu saya dan mungkin kita semua juga muak dengan *ke-sok-tahu-an* para pembuat film laki-laki heteroseksual ini menceritakan pengalaman perempuan *queer*.

Pengaruh kehadiran Céline Sciamma dan para sineas perempuan di seluruh dunia saat ini terhadap perkembangan gerakan perempuan layak untuk ditelisik lebih jauh. Benar bahwa film bisa jadi hanya medium hiburan untuk sebagian penikmatnya. Namun, ada perempuan-perempuan yang berusaha menggunakan medium film sebagai ruang bersuara. Mereka adalah perempuan yang berada di balik layar tidak hanya merumuskan naskah, tapi

juga mengangkat masalah. Mereka adalah perempuan yang melawan. Pengarusutamaan film dengan narasi pengalaman perempuan yang dikisahkan oleh perempuan itu sendiri adalah angin segar dalam pergerakan perempuan. Khususnya penceritaan film perempuan *queer* yang dirumuskan oleh pembuat film yang juga perempuan *queer*. Menghadirkan perempuan tidak sebatas untuk representasi, melainkan menunjukkan agensi dan posisi perlawanan perempuan. Sebuah sikap kritis, ideologis, dan tetap *nyeni* yang perlu kita gaungkan serta rayakan. *Bravo, bien joué!*





FLORENCE  
LAWRENCE

HANNAH  
AL RASHID

EMMA  
WATSON

MARISSA  
ANITA



# PEREMPUAN DAN SENI PERAN

KOALISI PICTURES MEMPERSEMBAHKAN SEBUAH FILM DARI REBECCA "PEREMPUAN DAN SENI PERAN"  
EMMA WATSON FLORENCE LAWRENCE HANNAH AL RASHID MARISSA ANITA PENULIS NASKAH REBECCA  
PENATA MUSIK RACHEL PORTMAN PENATA ARTISTIK DITA GAMBIRO PENYUNTING FILM MARGARET BOOTH

DI BIOSKOP 8 MARET 2022



# PEREMPUAN DAN SENI PERAN

Oleh : Rebecca Liony



Siapakah pemeran perempuan favoritmu?

**K**alau kita melihat layar kaca dan layar perak kini, banyak sekali pemeran perempuan yang memiliki kemampuan akting yang dalam sehingga bisa menghidupkan berbagai karakter pada cerita. Tokoh perempuan dengan berbagai identitasnya—seorang ibu, anak perempuan, perempuan pekerja, siswi sekolahan, dan lain-lain—ditampilkan pada serial televisi maupun film. Tapi, tahukah kamu kalau ada masa di mana perempuan tidak bisa turut bermain peran?

Sejarah perempuan dan seni peran

Pada budaya Yunani dan Roma sebelum Masehi, ternyata pertunjukan teater merupakan produksi yang eksklusif dilakukan oleh laki-laki. Budaya patriarki yang mendarah daging menempatkan perempuan di posisi yang cenderung lebih inferior dan lemah dibanding laki-laki. Maka dari itu, memainkan peran di atas panggung dan ditonton oleh banyak orang dianggap terlalu berbahaya bagi perempuan.<sup>1</sup> Karakter perempuan dalam cerita akan dilakonkan oleh pemeran laki-laki atau bahkan pemeran anak laki-laki.

Ingin tahu *ribetnya* tokoh perempuan yang harus diperankan oleh aktor laki-laki? *Shakespeare in Love*, film fiksi produksi tahun 1998 mencoba memberikan sedikit gambarannya. Viola de Lesseps, seorang perempuan, harus berpakaian dan berpura-pura menjadi laki-laki agar bisa mengikuti audisi teater yang naskahnya ditulis oleh Shakespeare.<sup>2</sup> Meski dibingkai dengan sisi komedi dan romantis, tentu saja film ini menjadi gambaran jelas bahwa pada tahun 1590-an, pilihan karir dan ranah ekspresi diri bagi perempuan sangat terbatas.

Pemeran perempuan pertama yang tampil

<sup>1</sup> NC Theatre. (2015). Women in Theatre: A Historical Look. Diakses dari <https://nctheatre.com/blog/women-theatre-historical-look#:~:text=Women%20were%20not%20allowed%20to,as%20well%20as%20female%20>

<sup>2</sup> Miramax. (1998). *Shakespeare In Love*. Diakses dari <https://www.miramax.com/movie/shakespeare-in-love/>

pada panggung di Inggris secara profesional adalah Margaret Hughes, 30 tahun, yang memainkan tokoh Desdemona pada pementasan Othello tahun 1660.<sup>3</sup> Ternyata, munculnya Hughes di atas panggung disambut dengan baik dan menjadi momentum yang sangat berharga bagi perempuan di dunia seni peran. Barulah pada tahun 1662, pemerintah Inggris mendeklarasikan bahwa semua tokoh perempuan harus diperankan oleh pemeran perempuan. Tidak berhenti disitu, produksi teater yang diisi oleh hanya oleh perempuan juga akhirnya mulai bermunculan.

Jejak para perempuan di dunia teater juga membuka jalan bagi perempuan di dunia perfilman. Pada 15 tahun pertama adanya industri perfilman—ketika film hanya film bisu—tidak

ada satupun pemain, sutradara, produser, atau penulis naskah perempuan yang diberikan kredit.<sup>4</sup> Florence Lawrence merupakan salah satu pemeran pertama yang diberikan kredit film dan sering disebut sebagai “bintang film pertama” pada industri perfilman. Selama karirnya, ia telah memainkan peran pada hampir 300 film dan sempat mendirikan rumah produksi film bersama rekan-rekannya. Rumah



produksi ini merupakan salah satu rumah produksi dengan pemilik perempuan pertama.<sup>5</sup> Keren banget, kan?

Selain pemeran perempuan yang terlibat pada produksi teater dan film, banyak juga perempuan yang mulai terlibat pada penyutradaraan, penulisan naskah, dan tim produksi lainnya. Tapi, tunggu dulu. Ternyata perjalanan perempuan pada dunia seni peran masih mengalami tantangan. Industri pertunjukan yang didominasi oleh laki-laki ini kemudian masih memproduksi tontonan yang diwarnai *male-gaze* (tatapan laki-laki)<sup>6</sup>. Tokoh perempuan ditampilkan seolah dari sudut pandang laki-laki heteroseksual, sehingga tokoh perempuan direpresentasikan sebagai objek pasif dari hasrat laki-laki.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Madam Guillotine. (2010). Margaret Hughes, first lady of the stage. Diakses dari <https://www.madameguillotine.co.uk/2010/12/08/margaret-hughes-first-lady-of-the-stage/>

<sup>4</sup> Harlow, Olivia. (n.d.). Who was the first movie star? Diakses dari <https://southtree.com/blogs/artifact/who-was-the-first-movie-star>

<sup>5</sup> Alexander, Kerri Lee. (n.d.). Florence Lawrence. Diakses dari <https://www.womenshistory.org/education-resources/biographies/florence-lawrence>

<sup>6</sup> Lebih lanjut tentang *Male gaze*, baca “Refleksi Sebuah Sinema, Ruang bagi Perempuan *Queer*.” di halaman 6

<sup>7</sup> Sampson, Rachael. (2015). Film Theory 101 – Laura Mulvey: The Male Gaze Theory. Diakses dari <https://www.filminquiry.com/film-theory-basics-laura-mulvey-male-gaze-theory/>



### **Male gaze, yang katanya memuliakan perempuan**

Kamu pasti tidak asing lagi dengan tokoh James Bond, seorang mata-mata asal Inggris yang selalu berhasil menyelamatkan Eropa, bahkan dunia, dari penjahat-penjahat kelas kakap. Semenjak filmnya dirilis pada tahun 1950-an, James Bond selalu ditemani oleh *Bond Girls* atau karakter-karakter perempuan yang menjadi pendamping atau pacarnya. Coba ambil waktu sejenak untuk mengingat tokoh James Bond: jas keren tanpa kerutan, mobil *sport* mewah, senjata api, kejar-kejaran seru, dan ledakan keras. Lalu coba ingat, adegan *Bond Girls* yang biasanya digambarkan di film: perempuan-perempuan dengan kaki jenjang, gaun ketat dan seksi, serta tingkah laku

yang anggun. Karakteristik Bond Girl pada plot James Bond pun kurang lebih selalu sama: menggoda, dapat dimanfaatkan, dan hadir di dunia ini hanya sebagai pendukung kisah James Bond semata.<sup>8</sup> Setelah hampir 70 tahun bergulir, ternyata posisi tokoh perempuan (serta pemerannya) pada film James Bond tidak berubah banyak. Hal ini juga bisa kita lihat pada film-film lain yang diproduksi oleh industri perfilman arus utama.

Belum selesai tantangan *male-gaze*, ternyata perempuan harus menghadapi berbagai tantangan lainnya. Dominasi laki-laki pada industri film dan pertunjukan menyebabkan jauh lebih sedikit perempuan yang mendapatkan peran utama pada film atau pertunjukan

teater. Belum lagi kalau kita membahas mengenai kesempatan pendidikan pada dunia akting bagi perempuan yang lebih sedikit dibanding laki-laki. Geena Davis, seorang pemeran perempuan, pelaku industri film, dan aktivis asal Amerika Serikat menjelaskan pentingnya representasi perempuan pada televisi dan film.<sup>9</sup> Geena menemukan bahwa keterlibatan perempuan pada layar lebar dan layar kaca mempengaruhi anak-anak kini. Tokoh laki-laki yang lebih banyak dan melakukan hal yang lebih hebat mengajarkan anak-anak bahwa laki-laki lebih penting dari perempuan. Anak perempuan yang secara konstan menonton televisi (yang dipenuhi oleh tokoh laki-laki) juga belajar bahwa pilihannya sebagai perempuan tidak banyak.

---

<sup>8</sup> Fisher, Darren Paul. (2021). Is James Bond a misogynist? He doesn't have to be Connery, Moore or even Craig's vision forever. Diakses dari <https://theconversation.com/is-james-bond-a-misogynist-he-doesnt-have-to-be-connery-moore-or-even-craigs-vision-forever-169619>

<sup>9</sup> Davis, Geena. (2019). Ask an activist: How is Hollywood faring on gender equality and representation of women on screen and why does it matter? Diakses dari <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/8/ask-an-activist-geena-davis>



## Berat sama dipikul, ringan jangat dibagi-bagi

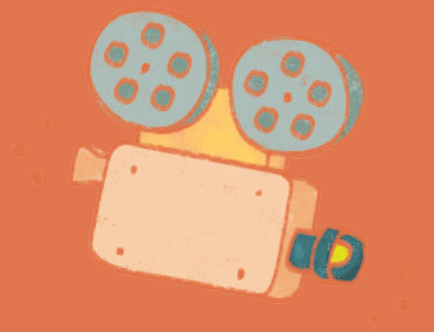
Tokoh laki-laki yang lebih banyak juga berpengaruh besar terhadap pendapatan yang diterima oleh para pemeran ini. Analisa yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata pemeran perempuan yang aktif membintangi film pada tahun 1984-2018 menerima gaji hanya

sebesar 45% dari rata-rata gaji pemeran laki-laki.<sup>10</sup> Pemeran perempuan dengan jumlah adegan yang sama dengan pasangan pemeran laki-laki biasanya mendapatkan gaji yang lebih sedikit. Jarak antara gaji pemeran perempuan dan pemeran laki-laki ini dinilai jauh lebih besar dibandingkan jarak antara gaji pada profesi lainnya.

Setelah semua tantangan tersebut, ternyata masih perempuan juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan penghargaan yang layak. *Academy Awards* atau yang sering disebut Penghargaan *Oscars* merupakan salah satu penghargaan paling bergengsi bagi individu dan kelompok pada industri perfilman. Analisis terhadap penghargaan ini



<sup>10</sup> Pedace, Roberto. (2019). Exploring the data on Hollywood's gender pay gap. Diakses dari <https://theconversation.com/exploring-the-data-on-hollywoods-gender-pay-gap-127414#:~:text=In%20the%20film%20industry%2C%20the,as%20the%20top%20male%20actors>



selama 10 tahun terakhir menunjukkan sebanyak 71.1% dari 679 nominasi adalah laki-laki. Tentu saja, jumlah nominasi perempuan yang tidak sampai setengah ini membuat pemenang penghargaan perempuan pun lebih sedikit. Untuk setiap satu pemenang *Oscars* perempuan, ada tiga orang pemenang *Oscars* laki-laki.<sup>11</sup>

Jika kita bicara spesifik mengenai kategori akting – pemeran (laki-laki) terbaik, pemeran pendukung (laki-laki) terbaik, pemeran (perempuan) terbaik, dan pemeran pendukung (perempuan) terbaik – maka tidak akan terlihat ketidaksetaraannya.

Akan tetapi, bagaimana perempuan dapat berkarya dengan baik jika ekosistem (dan rekan-rekan perempuan) di sekitarnya masih menjadi korban diskriminasi dan jarang dihargai?

### Mulai ada titik terang

Meskipun perjalanan panjang perempuan pada dunia seni peran terlihat begitu menantang, ternyata kita masih punya harapan. Tahun 2019 menjadi tonggak sejarah yang perlu dirayakan dimana terdapat 40% dari 100 film dengan pendapatan tertinggi memiliki tokoh utama perempuan. Jumlah ini merupakan jumlah terbanyak sepanjang sejarah. Isu kesenjangan gaji pun sudah dibahas secara blak-blakan. Pemeran dan pelaku perfilman perempuan mulai angkat bicara dan tidak berjalan sendiri.<sup>12</sup> Banyak aktor yang turut mendorong gaji yang setara antara laki-laki dan perempuan. Aktor pemeran

Sherlock asal Inggris, Benedict Cumberbatch, menegaskan bahwa ia akan menolak proyek yang tidak membayar rekan pemeran perempuan dengan setara.<sup>13</sup> Penghargaan *Oscars* dan beberapa penghargaan lainnya pun dengan rendah hati mulai berbenah dan menilik kembali indikator-indikator nominasi serta penilaian mereka untuk mendorong perubahan yang menetap dengan mengundang insan perfilman yang lebih beragam.

Di Indonesia sendiri, berbagai usaha untuk menciptakan ekosistem seni peran yang setara gender sedang dalam progres. Pada awal bulan Februari 2022, insan perfilman Indonesia beramai-ramai mengampanyekan “Diam Tak Selamanya Emas”. Rangkaian tulisan yang diunggah di berbagai kanal media sosial secara serentak ini mendorong individu pada dunia perfilman untuk menjadi lebih peka

---

<sup>11</sup> Sarkisian, Jacob. (2021). A complete breakdown of the Oscars diversity problem over the past decade. Diakses dari <https://www.insider.com/oscars-diversity-problem-race-gender-numbers-academy-awards-2021-2>.

<sup>12</sup> Heigl, Alex. (2021). ‘It’s Not Right’: 27 Actresses Who’ve Spoken Out About Being Paid Less than Male Stars. Diakses dari <https://people.com/celebrity/female-celebs-who-have-spoken-out-about-equal->

<sup>13</sup> Rueckert, Phineas. (2018). Benedict Cumberbatch Won’t Take a Role if Female Co-Star Isn’t Paid Equally. Diakses dari <https://www.globalcitizen.org/en/content/benedict-cumberbatch-gender-wage-gap/>

dan berkomitmen untuk menghapuskan kekerasan seksual saat proses produksi film.<sup>14</sup> Kampanye ini juga menjelaskan tindak lanjut dari komitmen bersama ini: menyusun surat pernyataan bersama, membuat pelatihan anti kekerasan seksual, dan mendorong dibuatnya kode dan dewan etik.

Jadi, kembali lagi: siapakah pemeran perempuan favoritmu? Kita bisa melihat banyak sekali nama yang terpatrit di hati para penontonnya. Bukan hanya karena kemampuan aktingnya, namun juga perjuangannya. Di luar Indonesia, nama-nama ini tidak hanya terkenal akan karir dan pencapaiannya, tetapi juga aktivisme dan kontribusinya: Betty White yang merupakan sekutu bagi komunitas keberagaman gender dan seksualitas, serta aktivis kesejahteraan hewan; atau Meryl Streep yang selalu menggunakan kesempatannya untuk mendorong keterlibatan politik dan kesetaraan gender. Tidak ketinggalan, pemeran perempuan Emma Watson di generasi yang lebih muda, yang tidak malu-malu membahas mengenai kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Di Indonesia kita juga bisa

menemukan nama pemeran perempuan yang turut mengukir sejarah dengan berkarir serta menyuarakan berbagai isu penting saat ini. Dua diantaranya (yang merupakan pemeran perempuan favorit penulis juga) adalah Hannah Al Rashid dan Marissa Anita. Selain menunjukkan kemampuan aktingnya melalui berbagai peran yang pernah dimainkan, keduanya juga secara vokal menyuarakan keresahan terhadap ketidaksetaraan gender dan kekerasan seksual di dunia perfilman. Akan tetapi, banyak juga pemeran perempuan yang masih harus menghadapi berbagai tantangan sistematis untuk dapat mengekspresikan dirinya melalui seni peran.

Sebagai seorang individu, tentu sulit bagi kita untuk mengubah satu industri yang sudah sejak lama berjalan seperti ini. Akan tetapi, langkah kecil kita tentu sangat berarti untuk mendukung para pemeran perempuan. Kita bisa memulai dengan mencari film atau serial yang dibuat oleh perempuan! Coba cek penulis naskahnya, sutradaranya, atau bahkan produsernya. Hal ini penting, karena film yang diproduksi oleh perempuan

atau melibatkan perempuan tentunya akan menghindari karya terjebak pada sudut pandang *male-gaze*. Hal lain yang bisa kita lakukan juga dengan mencari tahu apakah produksi film atau serial televisi yang kita tonton sudah ramah gender. Apakah ada berita mengenai jarak gaji antar pemerannya? Apakah ada kru produksi yang ternyata memiliki sejarah kasus kekerasan, apalagi kekerasan seksual? Yuk, kita sama-sama mendukung pemeran perempuan, karena pada akhirnya, perkembangan dunia seni peran dan juga perfilman kita sangat bergantung dengan para pemeran perempuan ini.

---

<sup>14</sup> Riandy, Ady Prawira. (2022). Ernest Prakasa Sambut Positif Gerakan Diam Tak Selamanya Emas. Diakses dari <https://www.kompas.com/hype/read/2022/02/07/172908866/ernest-prakasa-sambut-positif-gerakan-diam-tak-selamanya-emas>



# JURNALIS MENULIS ISU KEKERASAN SEKSUAL: MEMANG TAK MUDAH, FERGUSO!



*“Menulis kekerasan seksual itu memang kompleks, tapi jika bisa melewatinya, setidaknya kita tidak akan menjadikan penyintas menderita untuk kedua kali.”*

**S**epenggal kalimat itulah yang terngiang-ngiang di benak saya. Sejak setahun terakhir, saya belajar lebih serius menulis soal isu kekerasan seksual. Sebagai seseorang yang bertahun-tahun menjadi jurnalis ekonomi bisnis, memang





**tak dipungkiri bahwa saya sempat tergagap ketika beralih menuliskan isu sensitif yang menyangkut kehidupan penyintas kekerasan seksual. Tak bisa sembarangan, tentu saja!**

Bisa dikatakan bahwa saya memulai semuanya secara otodidak. Beberapa kali pindah kantor media, tak pernah ada pelatihan yang spesifik mengarah pada isu gender dan sensitivitas terhadap kasus yang dialami penyintas kekerasan seksual. Saya baru benar-benar belajar, ketika masuk ke media yang memang berfokus di isu perempuan dan kelompok minoritas. Di samping itu, aktivitas saya di organisasi profesi juga cukup membantu.

Sejak bergiat di AJI Jakarta tahun 2019 lalu, rutinitas saya bersama kawan-kawan di Divisi Gender, Anak, dan Kelompok Marginal salah satunya memantau pemberitaan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pemberitaan isu kekerasan seksual menjadi salah satunya.

Kami biasanya akan mengumpulkan berbagai pemberitaan, menganalisisnya dan membuat rilis sikap agar media bisa memperbaiki jurnalismenya sesuai dengan KEJ. Kami pun tak jarang mengadakan

diskusi dan kampanye di ekosistem media, termasuk mengikutsertakan Dewan Pers terkait pemberitaan yang berperspektif penyintas serta ramah terhadap keberagaman gender dan seksualitas.

Dari situlah saya mendapati bahwa memang jurnalis banyak ‘membuat dosa’ atas pemberitaan kekerasan seksual. Sejalan dengan riset yang dilakukan Konde.co tahun 2020 lalu, berita kekerasan seksual di media masih banyak yang mengabaikan perspektif perempuan. Ini tampak pada dramatisasi dan sensasionalisme yang digunakan media.

Catatan Konde.co, banyak media yang masih menggunakan diksi seperti “disetubuhi”, “pelaku punya ilmu hitam”, “dicabuli”, dan sebagainya (Konde.co, 2020). Berbagai diksi ini tentu saja semakin menambah berat beban penyintas kekerasan seksual.

Jika melihat realita itu, sebetulnya belum banyak perubahan dalam ekosistem media terkait pemberitaan kekerasan seksual di Indonesia. Pada tahun 2015, Komnas Perempuan pernah meluncurkan laporan analisis media bertajuk “Sejauh Mana Media telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?” yang memantau 9 media dalam periode Januari-Juni 2015. Terdapat 225 berita yang setidaknya ditemukan soal kekerasan seksual. Jumlah ini merupakan 18,17% dari total 1.238 berita yang dirilis oleh 9 media tersebut (Komnas Perempuan, 2015).

Komnas Perempuan menemukan bahwa mayoritas media masih abai dengan hal-hal mendasar terkait KEJ dan perspektif penyintas kekerasan seksual. Selain itu, media juga banyak yang justru menggiring pembaca untuk menghakimi

penyintas, misalnya dalam pada kasus artis sebagai pekerja seks. Dari total berita yang dianalisis, setidaknya ada 41 berita menyebut penyintas sebagai pemicu terjadinya kekerasan seksual, 24 berita bernada menghakimi penyintas, 28 berita melanggengkan stigma (stereotip) terhadap penyintas, serta 66 berita yang mengungkapkan identitas penyintas, keluarga penyintas, alamat rumah atau pekerjaan yang notabene tanpa persetujuan (Komnas Perempuan, 2015).

Pemberitaan demikian yang banyaknya dipublikasi oleh media online sungguhlah ironis, sebab banyak yang hanya mengejar jumlah klik. Atas nama *hit*, *SEO friendly*, dan *google friendly* untuk *cuan*, media bahkan sampai hari ini masih banyak yang mengesampingkan perspektif penyintas dalam kekerasan seksual.

Baru-baru ini, AJI Indonesia juga mengeluarkan rilis sikap untuk memperingatkan media untuk tetap mematuhi KEJ dan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. Salah satunya terkait pemberitaan kekerasan seksual di Geotimes yang ditemukan justru melakukan *profiling*, detail kronologi kekerasan seksual tanpa konfirmasi dan persetujuan, hingga memasang foto dan nama terang (AJI, 2022).

“Hal ini menambah beban trauma penyintas, termasuk para penyintas lain yang mengalami kasus serupa,” demikian keterangan tertulis AJI Indonesia, Kamis (3/2/2022).

AJI Indonesia menilai, pemberitaan semacam ini hanya satu dari sekian banyak praktik jurnalisme yang tidak berperspektif penyintas kekerasan seksual. Praktik lain yang sering AJI temui adalah penggunaan

diksi pada kasus pemerkosaan seperti “menggagahi”, “meniduri”, “menggilir”, atau “menodai” (Ibid.).

Diksi semacam itu menghilangkan unsur kejahatan dan memperkuat stigma seputar perempuan sebagai objek seksual. Dalam pandangan AJI, seharusnya media tidak menjadikan kasus kekerasan seksual sebagai komoditas untuk mendulang klik bagi media (Ibid.).

AJI berpandangan bahwa terdapat empat pasal dalam KEJ—yaitu Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 8—yang dalam konteks pemberitaan kekerasan seksual jelas menekankan jurnalis agar tidak boleh memiliki niat secara sengaja untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Ibid.). Dalam konteks ini, jurnalis seharusnya menghormati hak privasi dari penyintas kekerasan seksual, dan menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Selain itu, jurnalis juga semestinya tidak menyebutkan identitas atau informasi yang memudahkan orang lain untuk melacak penyintas.



Tidak hanya itu, AJI menilai bahwa media harus berupaya menjadi ruang aman bagi penyintas kekerasan seksual, sehingga mereka bisa bersuara tanpa rasa khawatir soal kerahasiaan identitasnya. Dalam hal ini, media dapat membantu penyintas mendapatkan keadilan dan mendorong kebijakan yang dapat mencegah dan menghapus perilaku kekerasan seksual (Ibid.).

Mengingat bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat kekerasan seksual, pemberitaan yang mengabaikan KEJ justru menjadikan penyintas kekerasan seksual sulit mendapat keadilan. Tidak hanya itu, praktik kekerasan seksual akan semakin menguat, termasuk di dunia kerja.

### **Problem Struktural Pemberitaan Kekerasan Seksual di Media**

Angka kekerasan seksual memang tak bisa dianggap remeh. Jumlahnya terpantau mengalami tren kenaikan. Berdasarkan Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2020, selama 2008-

2019, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebesar 792% atau nyaris 8 kali lipat. Sepanjang 2021, juga nyaris ada 300 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke berbagai lembaga pelayanan. Kekerasan seksual menduduki peringkat tertinggi dengan 45,6% di ranah publik/komunitas (Komnas Perempuan, 2020).

Di tengah situasi ini, media yang semestinya bisa memutus rantai kekerasan melalui kontribusi transmisi nilai dan informasi yang mendidik, justru masih kelimpungan memberitakan kekerasan seksual. Tak hanya itu, tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap jurnalis menjadikan iklim media sendiri memprihatinkan.

Riset PR2Media yang berlangsung selama Agustus-Oktober 2021, menemukan sebanyak 1.077 jurnalis (85,7%) pernah mengalami kekerasan. Hanya 179 responden (14,3%) yang tidak pernah mengalami kekerasan sama sekali. Jumlah responden riset ini sekitar 1.256 jurnalis perempuan di 191 kota dan kabupaten yang mewakili Indonesia bagian barat, tengah, dan timur yang menjadi responden (PR2Media, 2021).

Iklim media yang masih bias gender dan patriarkis memang menjadi hambatan tersendiri. Contoh sederhananya terlihat dari bagaimana guyonan seksis masih marak dilakukan awak redaksi selama beberapa tahun pengalaman saya menjadi jurnalis. Seksisme terhadap jurnalis perempuan juga terjadi kala liputan di lapangan. Ironisnya lagi, perusahaan media masih belum menjadi ruang aman bagi jurnalis untuk melaporkan pelecehan yang dialami.



AJI Jakarta tahun 2020 pernah mengadakan survei termasuk menyorot terkait SOP penanganan kekerasan dan pelecehan seksual, hanya 4 responden dari 32 orang yang menjawab bahwa perusahaannya memiliki SOP Penanganan Kekerasan Seksual (AJI, 2020).

Tanggapan dari kantor tempat bekerja penyintas pun tak menyenangkan, sebab hanya 1 jurnalis yang melapor kemudian diproses dan diberi pendampingan, sedangkan jurnalis lainnya, 8 penyintas menjawab direspons tapi tidak dilanjutkan, 3 penyintas disalahkan, 4 penyintas diintimidasi pelaku, 2 penyintas diintimidasi tempat kerja pelaku, 4 penyintas diintimidasi oleh kantor, 9 penyintas tidak ditanggapi, 1 penyintas dianggap tidak lazim (Ibid.).

Minimnya kebijakan yang sensitivitas gender termasuk soal kekerasan dan pelecehan seksual itu, bisa dibilang, juga akibat andil pemangku kebijakan di media yang masih begitu maskulin dan didominasi laki-laki. Data paling mutakhir yang diterbitkan AJI tahun 2012 bertajuk 'Jejak Jurnalis Perempuan' mencatat, pada setiap 10 jurnalis hanya ada 2 sampai 3 jurnalis perempuan. Hanya di pusat media, Jakarta, komposisi jurnalis perempuan dan laki-laki mencapai 40:60. Sementara, petinggi redaksi perempuan hanya berkisar di angka 6%. Artinya, 94% bukan pengambil keputusan keredaksian (AJI, 2012).

Sejauh pengalaman saya, situasi keredaksian yang masih belum menaruh perhatian terhadap pemberitaan ramah gender dan perspektif penyintas juga tampak pada minimnya pelatihan awak redaksinya. Maka tak heran bahwa produk berita yang dihasilkan dengan segala tuntutan klik media minim perspektif membangun dan memberdayakan.



### **Kolaborasi Pemberitaan Kekerasan Seksual Bisa Jadi Alternatif**

Selama nyaris 2 bulan, saya mewakili Konde.co melakukan liputan kolaborasi pemberitaan kekerasan seksual di Indekos bersama Koran Tempo, Jaring.id, Suara.com dan IDN Times. Kami mewawancarai para mahasiswi penyintas kekerasan seksual di indekos yang berada di Jakarta, Yogyakarta dan Jember. Selain itu, kami mewawancarai terduga pelaku, pemangku kebijakan kampus, hingga lembaga pendampingan. Proses persiapan wawancara hingga publikasi dilakukan dengan saling bekerja sama.

Tentu saja ini bukan hal yang sederhana. Namun, melalui kerja sama antar media ini, liputan mendalam kekerasan seksual bukanlah menjadi hal mustahil. Ini



pengalaman yang membuat saya terkesan dan banyak belajar soal meliput kekerasan seksual. Bukan saja disiplin dalam verifikasi fakta dan data, kami pun harus cermat untuk terus setia pada perspektif penyintas. Perspektif relasi kuasa serta ketimpangan gender dalam kasus pun tak boleh ditinggalkan.

Bahkan, usai liputan terbit, jurnalis masih mempunyai tanggung jawab kepada penyintas untuk memastikan keamanannya. Kami juga menghubungkan

penyintas kepada pendamping dan menjaga hak-hak penyintas.

Liputan ini memang satu dari sekian banyak kolaborasi di pemberitaan kekerasan seksual yang sudah lebih dulu dilakukan. Misalnya, liputan kolaborasi #NamaBaikKampus (Tirto, Jakarta Post, BBC, Vice) hingga terbaru Project Multatuli dengan konsorsium puluhan pers mahasiswa meliput kekerasan seksual di kampus. Saya harap, semakin banyaknya kolaborasi dalam peliputan KS bisa memberi dampak baik yang lebih besar.

### Penulis:

Nurul Nur Azizah, kini aktif sebagai Editor di Konde.co dan bergiat di AJI Jakarta sebagai Ketua Divisi Gender, Anak dan Kelompok Marginal

### Referensi:

- Aliansi Jurnalis Independen. (2021). Survei Kekerasan Seksual di Kalangan Jurnalis: Perlu Ada SOP Kekerasan Seksual yang Komprehensif. *Siaran Pers*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Aziza, N. N., & Luviana. (2022, Januari 24). Retrieved from Konde.co: <https://www.konde.co/2022/01/pelecehan-seksual-di-tempat-kos-bukan-mengayomi-bapak-kos-justru-melecehkanku-1.html/>
- Luviana. (2012). *Jejak Jurbalis Perempuan: Pemetaan Kondisi Kerja Jurnalis Perempuan Di Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Tim Komnas Perempuan (2015-2016). *Analisa Media : Sejauh Mana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Tim Komnas Perempuan (2019). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Mmembangun Ruang Yang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan. *Siaran Pers Komnas Perempuan : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan* (pp. 1-2). Jakarta: Komnas Perempuan.
- Tan, P. (2020, December 11). Retrieved from Konde.co: <https://www.konde.co/2020/12/riset-konde-co-media-melakukan-sensasionalisme-dan-tidak-konsisten-dalam-beritakan-isu-kekerasan-seksual.html/>
- Wendratama, E., Rahayu, Kurnia, N., Rianto, P., Aprilia, M. P., Masduki, . . . Wahyono, B. (2021). *Kekerasan Terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia: Ancaman Bagi Jurnalisisme dan Kebebasan Pers*. PR2Media.



# GERAKAN PEREMPUAN, SOLIDARITAS, DAN REFORMASI POLITIK INDONESIA

Oleh  
Dengan peninjauan oleh

: Iman Amirullah  
: Maulida Raviola

**G**erakan perempuan selama ini kerap terpinggirkan dalam berbagai narasi dan cerita soal heroisme gerakan reformasi, meskipun sebenarnya gerakan perempuan adalah bagian integral dalam proses perjuangan reformasi politik itu sendiri. Hal ini sebenarnya tidak amat mengejutkan, mengingat betapa masih maskulinnya narasi sejarah yang diajarkan oleh lembaga pendidikan maupun lingkaran-lingkaran aktivisme politik. Hal ini tidak semata-mata disebabkan

oleh maskulinitas. Lebih jauh, masalah ini berakar pada sistem patriarki dan seksisme yang terus dilanggengkan oleh negara dan para aktivis *cismale*<sup>1</sup> yang juga tidak kebal terhadap sikap-sikap yang menindas ini.

Rezim Orde Baru yang berkuasa dengan tangan-tangan besinya selama lebih dari 30 tahun juga bertanggung jawab terhadap penghancuran dan deradikalisasi<sup>2</sup> gerakan perempuan di Indonesia. Rezim

<sup>1</sup> *Cismale* atau pria cis sebutan bagi seorang pria yang identitas gendernya sesuai dengan identitas jenis kelamin saat dia lahir.

<sup>2</sup> Deradikalisasi mengacu pada tindakan preventif kontraterorisme atau strategi untuk menetralkan paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan. Tujuan dari deradikalisasi ini adalah untuk mengembalikan para aktor yang dianggap memiliki pemahaman radikal agar menjadi lebih moderat.



Orde Baru juga melakukan penundukan terhadap perempuan dengan menanamkan pemikiran bahwa perempuan yang ideal adalah perempuan yang pasrah dan patuh terhadap berbagai dominasi yang menimpanya. Organisasi-organisasi perempuan yang diizinkan oleh Orde Baru pun kebanyakan merupakan organisasi yang mencabut para perempuan dari gerakan radikal. Organisasi-organisasi seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) begitu menekankan konsep keibuan seorang perempuan gagasan keluarga inti (*nuclear family*). (Women Research Institute, 2013). Berbagai organisasi perempuan bentukan negara ini merupakan perpanjangan kekuasaan negara atas seksualitas perempuan dan membingkai peran seorang perempuan di dalam hubungan rumah tangga hanya sebagai ibu dan pendamping dari suami dengan seperangkat kewajiban pekerjaan domestik. (Floreta, 2020)

Proses radikalisasi para perempuan Indonesia kembali dimulai pada periode 1990-an seiring dengan semakin otoriternya rezim Soeharto serta krisis ekonomi yang menyertainya. Materi-materi terkait feminisme dan pembebasan perempuan pun menyebar di kalangan mahasiswa dan banyak aktivis seiring dengan penyebaran teori-teori kritis seperti Marxisme di berbagai lingkaran studi (Aripurnami, 2013). Pada puncak krisis moneter yang melanda Indonesia,

kemarahan perempuan menjadi salah satu isu pembakar gerakan reformasi, utamanya kemarahan para ibu rumah tangga yang menjadi tidak mampu membeli susu bagi anak-anaknya karena harga yang meningkat drastis (Sukmana, 2018).

Di tengah gonjang-ganjing dan drama politik dalam Sidang Umum MPR yang akan kembali melantik Soeharto sebagai presiden kembali, para perempuan dengan berani mengambil tindakan sendiri dan mendirikan gerakan Suara Ibu Peduli (SIP), sebuah komunitas yang diinisiasi oleh para aktivis perempuan sebagai inisiatif untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi dari para perempuan yang terlupakan. Tuntutan-tuntutan seperti pemerintah harus menurunkan harga berbagai kebutuhan pokok dan susu digaungkan oleh gerakan yang terdesentralisasi ini di tengah berbagai keributan politik (Aripurnami, 2013).

Dalam berbagai cerita soal perjuangan melawan Orde Baru, kita biasanya lebih banyak mendengar atau membaca tentang peran aktor-aktor seperti kelompok mahasiswa dan buruh sebagai motor penggerak dalam berbagai aksi demonstrasi yang mengiringi proses reformasi. Padahal kelompok perempuan juga menjadi salah satu aktor yang penting dalam proses ini, salah satunya melalui Suara Ibu Peduli. Padahal SIP memainkan peran sangat vital dalam berbagai gelombang unjuk rasa. SIP menggalang





dana dan menyebarkan produk-produk susu murah kepada para ibu yang kesulitan memenuhi kebutuhan anaknya. Penangkapan tiga pimpinan SIP dalam sebuah demonstrasi menjadi salah satu katalisator kemarahan publik terhadap aparat dan rezim penguasa. (Janti, 2018) Penangkapan ini juga menjadi pengait yang menyatukan berbagai kelompok dan organisasi pro-demokrasi yang sebelumnya cenderung berjuang dalam isu sektoral saja. Melalui dukungan SIP dalam berbagai demonstrasi politik dengan kerja-kerja logistik, organisasi ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai salah satu penyokong utama berbagai demonstrasi (Aripurnami, 2013).

Selain SIP, gerakan perempuan juga mengkonsolidasi perjuangannya dengan mendirikan *crisis center* yang melakukan berbagai pekerjaan solidaritas seperti mendata korban-korban rezim, memberikan akses layanan kesehatan mental terhadap para korban dan keluarga korban, serta mengampanyekan gerakan dukungan terhadap para perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual selama gelombang reformasi (Sukmana, 2018).

Gerakan perempuan memainkan peran yang begitu vital dan banyak dilupakan oleh berbagai organisasi yang terlibat dalam proses reformasi, mulai dari logistik hingga pendampingan terhadap korban. Saat kerusuhan Mei 1998 meletus, korban-korban sipil utamanya etnis Tionghoa

menjadi sasaran berbagai kekerasan dan pembunuhan. Sejumlah aktivis perempuan dari berbagai latar belakang berperan penting dalam menemukan fakta mencengangkan di tengah penyelidikan terhadap tragedi ini, di mana lebih dari seratus perempuan Tionghoa juga menjadi korban kekerasan seksual (Lestari, 2018).

Gerakan-gerakan perempuan pun tak tinggal diam dan terus mendorong negara untuk bertanggung jawab atas kekerasan yang menimpa para perempuan Tionghoa. Tekanan-tekanan ini berbuah pembentukan Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) yang diinstruksikan oleh Presiden saat itu, BJ Habibie. Penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh TGPF menegaskan kebenaran dugaan keterlibatan aparat dalam tragedi ini, seperti yang dinyatakan oleh berbagai gerakan perempuan sebelumnya (Aripurnami, 2013). Sayangnya, walaupun reformasi kini telah berusia lebih dari 20 tahun, rekomendasi TGPF tidak bergerak kemana-mana dan negara masih enggan untuk meminta maaf. Meskipun begitu, gerakan perempuan juga berhasil meraih banyak keberhasilan-keberhasilan besar seperti pembentukan Komnas Perempuan yang juga masih terus eksis hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan perempuan mampu memberikan tekanan besar kepada negara untuk segera menyelesaikan masalah kekerasan seksual yang menimpa ratusan perempuan.

Gerakan perempuan kini telah semakin berkembang dan meraih berbagai keberhasilan yang sebelumnya sulit untuk dibayangkan. Keras demokratisasi yang dibuka pasca terjadinya reformasi memunculkan berbagai gerakan dan organisasi perempuan yang berjuang dalam berbagai sektor, mulai dari pekerja rumah tangga, petani, hingga hak-hak *queer*. Materi-materi feminisme pun semakin tersebar tak hanya di lingkaran aktivis saja, melainkan sudah menyentuh banyak kalangan masyarakat, dan perjuangannya kini semakin interseksional.<sup>3</sup> Meskipun terus menghadapi tantangan dari kalangan konservatif, gerakan perempuan pada saat ini telah berkembang semakin pesat dan menjadi ujung tombak perjuangan mewujudkan Indonesia yang lebih setara.

## Referensi

- Aripurnami, Sita. 2013. "Jelajah Gerakan Perempuan Untuk Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Afirmasi* 2(Januari 2013). Diakses dari: [https://www.wri.or.id/files/Jurnal\\_Afirmasi\\_2\\_WRI.pdf](https://www.wri.or.id/files/Jurnal_Afirmasi_2_WRI.pdf).
- Sukmana, Yoga. 2018. "Gerakan Perempuan Dalam Pergolakan Reformasi 1998" *Kompas.com*. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/20/17420821/gerakan-perempuan-dalam-pergolakan-reformasi-1998?page=all> (February 1, 2022).
- Lestari, Sri. 2018. "Perkosaan Mei 1998 'tak pernah terungkap, tak pernah dituntaskan'" *BBC*. Diakses dari: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44134808> (February 10, 2022).
- Women Research Institute. 2013. "Gerakan Perempuan Bagian Gerakan Demokrasi Di Indonesia Studi Kasus: Jakarta, Lampung, Sumatera Utara, Padang Dan Lombok." *Jurnal Afirmasi* 2(Januari 2013). Diakses dari: <https://www.wri.or.id/publikasi/jurnal/113-gerakan-perempuan-bagian-gerakan-demokrasi-di-indonesia.html#YfkOVurP3IU>
- Janti, Nur. 2018. "Kala Ibu Bersatu" *Historia*. Diakses dari: <https://historia.id/politik/articles/kala-ibu-bersatu-6jJWd/page/2> (February 16, 2022).
- D., Jasmine Floretta V.. 2020. "4 Fase Gerakan Perempuan di Indonesia dan Apa yang Bisa Kita Pelajari Darinya" *Magdalene*. Diakses dari: <https://magdalene.co/story/4-fase-gerakan-perempuan-di-indonesia-dan-apa-yang-bisa-kita-pelajari-darinya> (February 16, 2022).

---

<sup>3</sup> Interseksionalitas adalah kajian tentang titik temu atau hubungan antara segala sistem atau bentuk penindasan, dominasi atau diskriminasi. Interseksionalitas menyatakan bahwa konseptualisasi klasik penindasan dalam masyarakat, seperti rasisme, seksisme, bifobia, homofobia, transfobia, panfobia dan juga kefanatikan terhadap kepercayaan, tidak bertindak secara independen satu sama lain, melainkan bentuk-bentuk penindasan tersebut saling berhubungan, menciptakan sistem penindasan yang mencerminkan "persimpangan" dari berbagai bentuk diskriminasi





# KETIKA STATUS PERKAWINAN PEREMPUAN JADI MASALAH: REFLEKSI FILM “YUNI”

Oleh : Angela Ranitta Kusumadewi



**B**ulan Desember 2021 lalu, film “Yuni” resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia. Film yang disutradarai Kamila Andini dan diproduksi oleh Fourcolour Films tersebut sebelumnya tayang perdana dalam Festival Film Internasional Toronto 2021. Dalam ajang bergengsi itu pula, “Yuni” berhasil membawa pulang penghargaan kategori *Platform Prize*.

Sesuai dengan judulnya, “Yuni” mengisahkan lika-liku kehidupan seorang remaja perempuan asal Banten bernama Yuni (diperankan oleh Arawinda Kirana).





Suatu hari, ia menerima lamaran dari seorang pria asing bernama Iman, yang sontak ditolaknya mentah-mentah. Tak berselang lama, seorang laki-laki paruh baya bernama Mang Dodi datang melamarnya dan bermaksud menjadikan Yuni sebagai istri kedua. Tak tanggung-tanggung, Mang Dodi bahkan berjanji apabila didapatinya Yuni masih perawan saat malam pertama, maka ia akan menambah nominal mas kawin dalam bentuk uang tunai. Lagi-lagi, lamaran tersebut ditolak oleh Yuni. Penolakan ini membuat gadis itu mendapatkan tekanan besar dari lingkungannya yang meyakini

bahwa seorang perempuan akan melajang seumur hidup apabila menolak lamaran tiga kali berturut-turut.

Keraguan Yuni untuk menikah di usia belia seperti kebanyakan perempuan di kampung halamannya semakin besar ketika ia menyaksikan pahitnya realita pernikahan dini yang dialami oleh kedua sahabatnya, Tika dan Sarah, serta Teh Suci, perempuan yang tak sengaja dikenal Yuni saat sepeda motornya mogok di dekat tempat tinggal Teh Suci. Selain itu, hubungan Yuni dengan adik kelasnya, Yoga, semakin intens dan ia semakin dibayang-bayangi oleh keinginannya melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Yuni semakin terjepit oleh keadaan tatkala Pak Damar, guru Bahasa Indonesia di sekolahnya, datang sebagai pelamar ketiga, tepat setelah Yuni menguak identitas pria itu tanpa sengaja.

Film “Yuni” memang tidak hanya menarik untuk ditonton, tetapi juga berhasil membuka berbagai ruang diskusi, mulai dari isu perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga keberagaman gender. Bagi saya, salah satu hal yang cukup menarik dari film “Yuni” adalah syarat mendaftar kuliah lewat jalur beasiswa prestasi akademik yang ditawarkan oleh Ibu Lies kepada Yuni. Tokoh guru yang diperankan oleh aktris Marissa Anita tersebut menyebutkan bahwa selain nilai yang bagus dalam beberapa mata pelajaran tertentu, salah satu syarat mutlak untuk mendaftar beasiswa adalah tidak menikah alias berstatus lajang. Hal inilah yang nantinya menjadi salah satu konflik terbesar yang harus Yuni hadapi ketika lamaran demi lamaran datang kepadanya.

Sekilas, syarat tersebut terdengar masuk akal, terlebih apabila dikaitkan dengan isu

perkawinan anak yang secara gamblang dikritisi dalam film “Yuni”. Dalam hal ini, syarat belum atau tidak menikah idealnya dapat menjadi ‘senjata’ untuk melawan normalisasi perkawinan anak yang menghantui Yuni. Namun, apabila kita membawa konteks status perkawinan sebagai syarat mendaftar beasiswa atau melamar pekerjaan ke ruang yang lebih luas, sejatinya persyaratan tersebut merupakan hal yang bermasalah. Sebab, apa yang Yuni alami bukanlah hal fiktif belaka. Kita sendiri pastinya sudah cukup familiar dengan status perkawinan yang dijadikan sebagai salah satu syarat ketika hendak mendaftar beasiswa atau melamar pekerjaan. Atau mungkin salah satu di antara kita pernah mengalami kendala akibat status perkawinan tersebut.

Kemampuan perempuan untuk mengandung dan melahirkan, serta kerja-kerja domestik yang acap kali dibebankan sepenuhnya pada perempuan dijadikan alasan mengapa perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak lantas berkurang profesionalismenya. Sekalipun mereka tetap bekerja, tak sedikit yang perkembangan karirnya terhambat, atau bisa dikatakan dihambat, karena lagi-lagi, mereka dipaksa memilih antara keluarga dengan karir. Karenanya, tolak ukur kelayakan seorang perempuan untuk berkarir seringkali justru dinilai berdasarkan status perkawinannya, alih-alih prestasi maupun karakternya.

Hal ini lantas melahirkan narasi bahwa perempuan harus bisa *multitasking*—menjalankan peran ganda sebagai pekerja yang ulet sekaligus istri dan ibu yang terampil. Sejujurnya, saya tidak begitu sepakat dengan narasi yang mengatakan bahwa perempuan harus bisa *multitasking*; harus bisa menjalankan

peran sebagai istri dan ibu serta pekerja secara maksimal. Sebab, pada dasarnya, *multitasking* bukanlah hal yang mudah, bahkan cenderung mustahil dilakukan. Walaupun seseorang bisa *multitasking*, kebanyakan hasilnya tidak akan bisa maksimal karena harus membagi fokusnya kepada banyak hal sekaligus. Mewajibkan perempuan untuk dapat *multitasking* di rumah dan di tempat kerja serta menuntut hasil maksimal dari keduanya buat saya sangatlah konyol.

Bagi saya, tidak cukup apabila kita hanya menggaungkan narasi bahwa perempuan harus bisa begini dan begitu, tanpa mendorong keterlibatan laki-laki dalam sektor domestik, sehingga sang istri tidak harus dipaksa mengorbankan karir atau keluarga, maupun mati-matian menyeimbangkan peran di rumah dan di tempat kerja. *Toh*, pada dasarnya ruang domestik bukan hanya milik perempuan saja. Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian, dan lain-lain bukan tanggung jawab perempuan semata. Bahkan, hal-hal seperti memasak, mencuci, dan bersih-bersih adalah aktivitas yang seharusnya dikuasai oleh setiap orang tanpa memandang identitas gendernya. Tidak cukup pula apabila tidak adanya upaya untuk mengubah sistem yang selama ini berlaku; sistem yang bias gender dan mengabaikan fakta bahwa perempuan memiliki kebutuhan reproduksi yang berbeda dengan laki-laki, misalnya. Dulu, sempat ada seorang pengguna Twitter yang menulis utas mengenai diskriminasi terhadap ibu pekerja di tempat kerja dengan tidak diberikannya cuti nifas serta ruang menyusui/laktasi. Utas tersebut sempat dikritik oleh beberapa pengguna Twitter lain yang menganggap ia manja, banyak mau, dan merugikan perusahaan.

Ujung-ujungnya, kita kembali pada argumen “kalau tidak mau repot, ya sudah berhenti kerja dan fokus mengurus rumah saja.”

Saya selalu meyakini bahwa kesempatan setara tanpa ada akses setara untuk meraih kesempatan itu adalah percuma. Selama ini, diskursus mengenai kesetaraan gender masih hampir selalu dipertanyakan. “Bukankah sekarang perempuan dan laki-laki sudah memiliki kesempatan setara? Lantas apa lagi yang masih dipermasalahkan?” Memang, di zaman modern ini, perempuan tidak lagi dilarang mengenyam pendidikan atau memiliki penghasilan sendiri. Setidaknya tak secara blak-blakan atau ada larangan mutlak yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi secara hukum. Namun, apakah artinya kesempatan setara tersebut

apabila akses untuk menuju ke sana masih teramat bias gender? Apakah artinya apabila perempuan masih dipaksa untuk memilih mau jadi pengangguran atau istri sekaligus ibu yang abai? Apakah artinya apabila perempuan masih dituntut untuk bisa bekerja sekaligus mengurus rumah tangga secara sempurna dan tanpa cela?

Film “Yuni” membuka mata kita bahwa apa yang tidak kalah penting dari adanya kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan hidupnya adalah terbukanya akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk meraih kebebasan itu sendiri. Momentum Hari Perempuan Internasional 2022 ini dapat kita manfaatkan untuk menggaungkan narasi tersebut, sehingga tak perlu lagi ada Yuni-Yuni lain di luar sana. Selamat Hari Perempuan Internasional 2022!



Dukungan dan Menghargai Keputusan



# PENDEKAR BERBALUT BATIK KEBAYA

Oleh : RC.Nurul A'la



Kembang buana,  
Tumbuh dari tanah sampena  
Dipupuk bersama asa dan rahsa  
Sehari dengan adorasi arumi.

Bagaskara tentang persistensi,  
Dipayungi payoda, dilingkup cita  
Ingin tumbuh darinya sampai rimpuh,  
Bersama daun-daun berbasah embun,  
Hingga ratapan ini berubah menjadi harapan,  
Menaungi seluruh citta perempuan dunia.

Kamilah titisan lintang,  
Pernah berjuang di pusaran galaksi  
Tak ayal kami selalu berpendar,  
Ingin singkirkan seluruh shyam yang meliputi  
Tak ingin pilau karsa andam karam,  
Hanya karena mercusuar yang tak dipatri.

Kamilah anindya turunan Tuhan  
Penegak suatu bangsa berbayar ratakan ancala,  
Tak hirau karena kami alma pembakar buntara,  
Tak akan biarkan sumarah memapah,  
Tak jua asa tinggalkan daksa,  
Apalagi adorasi berubah basi.

Kami berjuang pada hak yang diabaikan,  
Kami berjuang pada gelabah yang tak tersam-  
paikan,  
Arkais memang, tapi itulah berharga,  
Lemah memang, tapi kamilah Ibu negara.



Kami berjuang untuk timbangan alam,  
Jangan pilih yang bagus untuk dibungkus,  
Jangan tilik yang cantik untuk kau petik,  
Jangan kucilkan kami yang kecil dan kerdil.  
Karena beragam tak bawa kelam,  
Mereka tak salah hanya karena mengalah.

Langkah yang serasi, tersusuri bersama citta yang kalis  
Baka dengan segala ugem yang selama ini terbancang,  
Dan sekarang kami ingin mengepakkan sayap,  
Ingin berputar dalam semak belukar  
Ingin bernyanyi di bawah demonstrasi,  
Berpidato tentang hitam putih yang lindap,  
Bahwa berbeda tak boleh andam karam  
Tidak jua diskriminasi beratap gengsi,  
Karena sejati dunia akan lebih indah dan nyaman  
Bila dianyam dalam aman dan toleransi.

Biarkan kami bercuap-cuap,  
Dengan nama yang padmarini terdengar  
Itulah kami, pejuang berbalut batik kebaya,  
Yang singkap jamanika terbuka, singkirkan pedar  
Biarkan indurasmi menerobos, menyalip baswara,  
Biarkan harsa kami rasa, sebelum gata.

Ingin kami tinggalkan maksud hari ini, sebetuk suar,  
Di balik busungan dada anak dara yang diganjal tekad,  
Karena kalianlah pejuang hari esok,  
Pejuang dari kaum perempuan perkasa.

Aceh, 11 Februari 2022



# TERAS (TEBAK WARAS)

Oleh : Annisa Inayah



BREAK THE BIAS

Dalam rangka, memperingati Hari Perempuan Internasional yang bertema “**#BreakTheBias**” kami mengajak kamu untuk memecahkan tebak-tebakan waras ini :

1. Sejak negara api menyerang, sudah ada istilah ketimpangan sistem pajak untuk perempuan yang disimbolkan dengan warna :
  - a. Merah Api
  - b. Kuning Langsung
  - c. Merah Muda
  - d. Merah Tua
2. Seharusnya ketika seorang perempuan memilih tidak menikah atau tidak memiliki anak, ia perlu mendapat :
  - a. Bantuan Sosial
  - b. Stigma
  - c. Ceramah
  - d. Dukungan dan Menghargai Keputusan
3. Dibawah ini adalah ciri-ciri perempuan sejati sampai mati, beri tanda pada jawaban yang benar :
  - a. Bisa masak
  - b. Melayani Pasangan
  - c. Kutilang (Kurus Tinggi Langsing)
  - d. Menjadi Diri Sendiri
4. Seharusnya ketika seorang perempuan memilih ingin menjadi Ibu Rumah Tangga, kita perlu berikan :
  - a. Bantuan Sosial
  - b. Stigma
  - c. Ceramah
  - d. Dukungan dan Menghargai Keputusan
5. Di sebuah perusahaan, terdapat seorang buruh perempuan yang hanya mendapat upah 75% dari buruh laki-laki. Alasannya karena jumlah pekerja perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki. Hal ini dinamakan :
  - a. Takdir
  - b. Nasib
  - c. Ketimpangan
  - d. Kebingungan

Jika kamu dapat menjawab dengan benar semua, SELAMAT!  
hatimu masih waras dan jiwamu dalam kondisi yang baik-baik saja







# MENGENAL KOALISI INKLUSIF RIGHT HERE RIGHT NOW (RHRN)

Oleh : Annisa Inayah



Rutgers

Ruang Temu  
Generasi Sehat  
Indonesia



Palang  
Merah  
Indonesia



**K**oalisi Inklusif merupakan sebuah koalisi yang mengedepankan gerakan orang muda pada isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) serta Keberagaman Gender dan Seksualitas. Koalisi Inklusif saat ini digawangi oleh orang muda dari berbagai latar belakang. Terdiri dari beberapa organisasi diantaranya:

- Ruang Temu Generasi Sehat (Rutgers Indonesia) - <https://rutgers.id/>
- Pamflet Generasi - <https://pamflet.or.id/>
- Youth Interfaith Forum on Sexuality (YIFoS) - <https://yifosindonesia.org/>
- Palang Merah Indonesia (PMI) - <https://pmi.or.id/>
- Sanggar Swara - <https://sanggarswara.org/>
- Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) - <http://ykp.or.id/>

Koalisi Inklusif dalam kerjanya berusaha untuk mendorong adanya pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Kesetaraan Gender secara inklusif di 3 wilayah di Indonesia yakni Indramayu (Jawa Barat), Jombang (Jawa Timur), dan Langkat (Sumatera Utara).

Beberapa kegiatan yang dijalankan oleh anggota koalisi antara lain:

(Kegiatan yang dituliskan dapat berupa kegiatan RHRN di lembaga yang paling ingin di highlight yang telah dilaksanakan di 2021 dan bisa di share kepada publik atau bisa kegiatan tahun lalu yang paling membanggakan. Maksimal 250 kata per organisasi. Contoh newsletter sebelumnya : [https://docs.google.com/document/d/1BtdluyDGnMEIgVejSFvcjUosT\\_ECD4ul/edit](https://docs.google.com/document/d/1BtdluyDGnMEIgVejSFvcjUosT_ECD4ul/edit))



## **Rutgers Indonesia : Dibutuhkan! Kebijakan Teknis Untuk Pelaksanaan Edukasi dan Layanan Kesehatan Reproduksi Ramah Remaja di Daerah**

Kaum muda Indonesia diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) dan mampu mewujudkannya dalam masyarakat yang berkeadilan gender. Orang muda juga harus mampu mendorong pemerintah agar lebih terbuka kepada anak muda dengan ragam latar belakang dan identitas, termasuk penyandang disabilitas, untuk memberikan dukungan berupa kebijakan serta menciptakan ruang aman untuk menyuarakan pendapat. Inilah yang menjadi fokus program koalisi RHRN hingga tahun 2025

Untuk mencapai hal tersebut itu, serta mengimplementasikan dalam strategi program, perlu advokasi berbasis bukti melalui pelaksanaan analisis situasi atau ansit. Ansit adalah pengumpulan informasi pada para pihak atau publik yang terlibat untuk melihat kesenjangan antara peraturan yang ada dengan implementasi di layanan, strategi program serta alokasi anggaran.

Pada Desember 2021, Rutgers Indonesia melalui 3 mitra lokal telah melakukan Ansit di Indramayu, Langkat dan Jombang. Hasil ansit menunjukkan beberapa temuan penting, pertama, ketiga kabupaten telah memiliki kebijakan yang dapat menjadi payung pelaksanaan program edukasi kesehatan reproduksi remaja, antara lain peraturan tentang kabupaten/ kota

layak anak, pencegahan eksploitasi seksual pada anak, dan pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan.

Tetapi, temuan ini juga menunjukkan, hampir semua daerah belum memiliki aturan teknis terkait implementasi bagaimana edukasi dan layanan untuk kespro remaja dapat disampaikan. Untuk Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di 3 daerah, meski Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan Pedoman PKPR pada tahun 2014, tetapi dalam pelaksanaan masih terjadi kesenjangan, baik dari kualitas tenaga kesehatan, dukungan sarana hingga anggaran program yang tidak memadai. Padahal, instrumen teknis serta dukungan inilah yang diperlukan para pelaksana program di layanan, baik Puskesmas maupun Posyandu Remaja.

Temuan penting kedua adalah masih didapati kebijakan di tingkat kabupaten yang berpotensi mendiskriminasi kelompok minoritas, gender, keyakinan dan disabilitas, misalnya aturan tentang tata cara berpakaian seragam yang mengacu pada agama tertentu. Dan ketiga adalah anak muda di tiga daerah belum secara nyata dan bermakna terlibat dalam proses-proses penyusunan kebijakan dan anggaran yang menyangkut diri mereka, misalnya dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) baik tingkat desa maupun kabupaten.

Dari temuan hasil ansit ini, program advokasi koalisi RHRN2 untuk 4 tahun ke depan berupaya menjawab

tantangan dan kesenjangan ini, antara lain mendorong terciptanya aturan teknis pelaksanaan PKPR di layanan dan memastikan adanya edukasi kespro remaja di komunitas. Serta memastikan anak muda terlibat dalam proses perencanaan kebijakan dan anggaran yang menyangkut dirinya.

**2 Menyambut Dukungan Publik melalui Kampanye Pamflet Generasi**  
Pamflet Generasi merupakan *youth-led organization* yang mengawali perjuangannya dari kampanye-kampanye orang muda yang bermakna. Dengan melibatkan seluruh orang muda di penjuru Indonesia, kampanye yang dimotori pamflet diharapkan mampu membuat percikan gerakan dan semangat baru khususnya pada isu kesehatan seksual dan reproduksi.

Pada tahun 2021, Pamflet Generasi melalui platform Beda itu Biasa telah menjangkau kurang lebih 660.000 jangkauan dari berbagai sosial media. Kampanye yang tak terlupakan di penghujung 2021 kemarin yaitu perihal membuat film pendek “Kuliah atau Nikah”. Film tersebut melibatkan langsung usia muda dan satu orang dewasa yang berasal dari latar belakang keragaman gender dan seksualitas. Film ini menyajikan banyak sudut pandang baik yang bisa ditangkap perihal cita cita, cinta maupun keragaman gender dan seksualitas yang ada.

Selain film pendek, Pamflet juga menjangkau orang muda melalui penyediaan akses informasi secara fisik dan digital yang bernama Nawala

atau Newsletter Pamflet Generasi. Sudah ada Dua Newsletter sepanjang 2021 yang bertema gerakan orang muda dan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dimana kurang lebih sudah 420 kali diunduh dan 112 pcs dibagikan kepada organisasi dan mitra orang muda sepanjang bulan Agustus hingga Desember 2021.

Tentunya pada 2022 mendatang, Pamflet Generasi terus menjangkau orang muda dengan kampanye kampanye yang mendukung gerakan publik terhadap isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi pada platform [@bedaitubiasa](#).

**3 Membuka Akses Informasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Melalui Palang Merah Indonesia**  
Pada tahun 2021 dalam Program RHRN2 PMI telah mendorong terbentuknya jaringan orang muda yang beranggotakan 29 orang muda dari 29 provinsi yang berbeda di Indonesia. PMI juga telah melakukan kampanye di media sosial dengan 4 tema yang berbeda yaitu Kesehatan Seksual dan Reproduksi, HIV &



AIDS, Orang Muda Sebagai Agen Perubahan dan Kekerasan Seksual, Kami telah berhasil menjangkau 313556 masyarakat secara umum di 3 platform media yang kami gunakan (Facebook, Youtube, Instagram).

Di tahun 2021 pula PMI telah mendorong tersedianya akses informasi dan edukasi Kesehatan Reproduksi di sekolah dengan menjalin kerjasama dengan 15 sekolah potensial tingkat SMP di Kab. Indramayu, Kab. Jombang dan Kab. Langkat, dengan begitu di tahun 2022 melalui Program Right Here Right Now2 (RHRN 2) PMI akan melaksanakan berbagai Pelatihan dan Penguatan Kapasitas bagi orang muda dan Masyarakat terkait (Seperti Guru, Orang tua dll) mengenai isu kesehatan seksual dan reproduksi.

Pada tahun ini pula, PMI akan melanjutkan kegiatan kampanye melalui media sosial yang akan dikemas secara menarik dan akan dibawa oleh persona karakter yang akan PMI kenalkan pada bulan Maret mendatang. Selain itu, Teman-teman juga dapat melihat dan keppoin kegiatan PMI lainnya, khususnya pembahasan Isu-su orang muda dan Kesehatan seksual dan reproduksi. So, jangan lupa mampir di platform media PMI.

*ig: @palangmerah\_indonesia, Youtube: PMI TV, Fb: Palang Merah Indonesia*



#### **Berdaya Dalam Komunitas SWARA**

Sanggar Swara adalah organisasi berbasis komunitas Transgender Perempuan (Transpuan) di Jabodetabek yang fokus pada kerja



pemberdayaan, pendidikan, advokasi dan kampanye. Sebagai organisasi yang fokus pada advokasi dan pendidikan Transpuan.

Pada 2021, Sanggar Swara melaksanakan salah satu kegiatan rutin di setiap tahunnya, pada awal maret 2021, yaitu Transschool (Transgender School), Transschool sendiri adalah sekolah alternatif bagi transpuan muda yang diberikan kapasitas tentang SOGIE, HKSR dan juga HAM, transschool sendiri, sudah berjalan selama 1 dekade, dan melahirkan banyak Alumni-Alumni Transpuan yang berdaya dan berprestasi, selain kegiatan *Transschool*, di tahun 2021,

Sanggar Swara juga aktif melakukan Kampanye rutin di Platform Social Media Instagram sanggar swara di @Transschoolswara salah satunya adalah program CuCo Sis, program yang mengundang bintang tamu para Transpuan berprestasi dan menginspirasi, selain itu, Sanggar Swara juga membuat kolaborasi bersama, cerita teman-teman Transpuan dengan ceritanya yang berbeda-beda 1 dengan lainnya



dalam video yang diunggah di youtube, yaitu CERITRANS, tentunya di tahun 2022 akan ada beberapa kegiatan yang akan Sanggar Swara lakukan, salah satunya adalah TRANSCHOOL 2022, untuk teman-teman yang penasaran tentang Sanggar Swara, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang sedang Sanggar Swara lakukan, teman-teman bisa langsung cek akun instagram sanggar swara di @Transchoolswara

5

### **Pemenuhan Hak Perempuan dan HKSR oleh Yayasan Kesehatan Perempuan**

Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) merupakan organisasi yang fokus pada pemenuhan hak-hak perempuan dan hak kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif. Bergerak dengan metode advokasi, edukasi, dan kampanye, dilakukan oleh YKP secara terus-menerus sejak tahun 2001.

Pada tahun 2021, YKP bersama koalisi INKLUSIF menjalankan program RHRN2, dengan lokus kerja di 3 wilayah, yaitu Kab.



Indramayu, Kab. Langkat, dan Kab. Jombang. Pada program ini, YKP akan melakukan advokasi di tingkat Kabupaten terkait kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung pemenuhan HKSR yang inklusif dan komprehensif. Selain itu, YKP juga akan melakukan peningkatan kapasitas kepada kelompok orang muda dalam masyarakat serta kelompok individu di lingkungan orang muda (tokoh agama, tokoh adat, tenaga kesehatan, media/jurnalis dll)

Hingga akhir tahun 2021, YKP telah mengadakan Value Clarification and Attitude Transformation (VCAT) tahap pertama di 3 kabupaten, yang bertujuan untuk melihat nilai dan perspektif masyarakat terkait HKSR. Kegiatan ini menjangkau 24 orang muda dan 34 orang dewasa. Selain itu, YKP juga telah melakukan pertemuan bersama perwakilan jurnalis dan media dari 3 kabupaten dan media nasional.

Kampanye melalui media sosial juga kerap dilakukan untuk menjangkau orang muda dan pengguna media terkait isu HKSR. Pada platform media ini, tidak hanya kegiatan dari program RHRN2, namun juga menampilkan berbagai kegiatan yang dilakukan YKP di daerah lainnya. Akun-akun media sosial ini dapat dijangkau melalui :

IG : @ykesperempuan, FB : Yayasan Kesehatan Perempuan, Youtube: YKP TV



## **YIFoS Indonesia: Melalui *Queer Camp*, Saatnya Mendengar Orang Muda dari Ragam Identitas Iman dan Seksualitas!**

*Youth Interfaith Forum on Sexuality* atau yang akrab didengar dengan YIFoS Indonesia adalah organisasi nirlaba yang digerakan oleh orang muda serta berfokus dalam membangun perdamaian di tengah keberagaman identitas iman dan seksualitas.

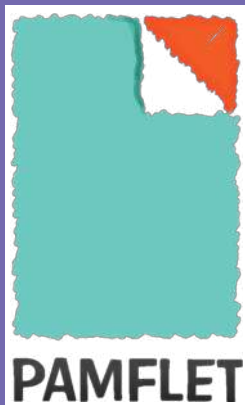
YIFoS Indonesia awal mula dibentuk pada 07 Maret 2010 di Sekolah TInggi Agama Buddha Syailendra, Kopeng, Salatiga. Hal tersebutlah yang menjadi dasar dari pergerakan YIFoS Indonesia sendiri. YIFoS Indonesia terus mendorong pelibatan orang muda yang bermakna dalam melakukan kerja-kerja perdamaian. Sejak 2010, YIFoS Indonesia membangun ruang aman untuk belajar interseksi iman dan seksualitas dalam diri orang muda yang dimanifestasikan dalam interaksi dengan lingkungan sekitar. YIFoS Indonesia juga aktif memproduksi tulisan-tulisan progresif yang terkait keberagaman gender dan seksualitas.

Dari tahun ke tahun, YIFoS Indonesia giat membuka ruang belajar dan dialog yang dikenal sebagai *Queer Camp*. *Queer Camp* merupakan ruang yang aman dan dapat diikuti oleh orang muda berbagai latar belakang termasuk teman-teman LGBTIQ dan Penghayat Kepercayaan. Peserta dalam kegiatan tersebut berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. YIFoS

Indonesia selalu memastikan seluruh orang muda memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses ruang belajar ini.

Sebagai ruang belajar dan berdialog yang aman, banyak sekali pelajaran yang sulit didapatkan pada pendidikan formal di Indonesia. Hal-hal yang dianggap tabu dalam masyarakat, bisa kita dialogkan dalam *Queer Camp* ini. Mulai dari bagaimana kita memaknai diri sendiri, penerimaan atas identitas diri yang dianggap berbeda, sadar akan otoritas tubuh, mengenal ragam gender di Indonesia, belajar tentang SOGIESC, membicarakan seksualitas di ruang-ruang keimanan, berdialog dengan teman-teman dari berbagai latar belakang terutama pengalaman dari teman-teman LGBTIQ dan Penghayat yang biasanya didiskriminasi dalam masyarakat, menganalisa situasi-situasi pelanggaran HAM, memahami pentingnya pendidikan seksualitas komprehensif, serta malam budaya sebagai bentuk pengekspresian dan merayakan keberagaman atas identitas diri yang begitu kompleks.

YIFoS Indonesia sangat berharap untuk terus bisa secara berkelanjutan membuka ruang-ruang belajar dan berdialog yang aman untuk semua, sehingga diharapkan mampu membawa perubahan-perubahan menuju perdamaian lewat menciptakan ruang yang aman, nyaman dan setara bagi orang muda di Indonesia. Mari berkenalan lebih lanjut dengan YIFoS Indonesia melalui akun instagram: [@yifos\\_indonesia](https://www.instagram.com/yifos_indonesia).



## TENTANG KAMI

Perkumpulan Pamflet Generasi (Pamflet) adalah organisasi anak muda yang didirikan untuk mendorong dan memperkuat anak muda untuk berpartisipasi dalam proses gerakan sosial, dengan memberikan informasi serta pengetahuan tentang aktivisme dan hak asasi manusia.

Pamflet didirikan dan juga dijalankan oleh anak muda yang berusia 16-30 tahun. Dengan tiga divisi utama: *Youth Studies*, *Youth Movement*, dan *Youth Activism*, kami bekerja untuk memperkuat akses anak muda terhadap informasi, sumber daya, dan jaringan yang terkait dengan hak asasi manusia. Pamflet juga aktif mendorong inisiatif anak muda lokal (individu/kolektif) di berbagai wilayah di Indonesia melalui kegiatan seperti penelitian, pengembangan kapasitas, pelatihan, kampanye kreatif, dan publikasi.

### Temukan Kami di:

Situs web : [www.pamflet.or.id](http://www.pamflet.or.id)

Instagram : [@pamfletgenerasi](https://www.instagram.com/pamfletgenerasi)

Facebook : [facebook.com/pamfletgen](https://www.facebook.com/pamfletgen)

Twitter : [@\\_pamflet](https://twitter.com/_pamflet)

Youtube : [Pamflet Generasi](https://www.youtube.com/PamfletGenerasi)

Surrel : [halo@pamflet.or.id](mailto:halo@pamflet.or.id)



Diterbitkan Oleh:

